

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasifik Selatan adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah teritori yang kecil. Negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, kawasan ini tetap menjadi perebutan bagi kekuatan-kekuatan besar, baik itu negara seperti Tiongkok maupun Australia yang merupakan bagian dari Pasifik Selatan sendiri, juga turut serta dalam usaha memperebutkan pengaruh di wilayah Pasifik Selatan.

Pasifik Selatan mayoritas dihuni oleh negara-negara kepulauan dengan negara seperti Fiji, Samoa, Vanuatu dan negara lain termasuk didalamnya. Sedangkan Australia sendiri juga negara di kawasan yang memiliki luas wilayah, populasi dan kekuatan militer terbesar di kawasan Pasifik Selatan sehingga menjadi salah satu aktor utama di kawasan tersebut. Setiap kejadian maupun kegiatan yang berlangsung di Pasifik Selatan di negara-negarakawasan Pasifik Selatan tidak lepas dari perhatian serta kebijakan luar negeri pemerintahan Australia , mengingat hal tersebut bisa berimbas bagi kepentingan keamanan nasional Australia(Shepard, 2009, p. 413).

Dalam hal lain, hubungan kerja sama dan kehadiran yang dibangun Tiongkok di Pasifik Selatan dalam beberapa dekade terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar, dan beberapa negara menjadi mitra kerja sama Tiongkok. Namun, berbagai aktivitas Tiongkok di beberapa negara di kawasan

Pasifik Selatan yang terlihat dalam belakangan ini memunculkan sejumlah dugaan dari aktor-aktor tradisional yang telah lama ada di kawasan, termasuk Australia. Hal ini mengingatkan sifat agresif Tiongkok masa lampau dan peningkatan kehadiran militernya di kepulauan pasifik berpotensi membawa ancaman bagi Australia (Wallis, 2012).

Awal mula Tiongkok meningkatkan perhatiannya ke Pasifik Selatan secara intensif adalah setelah Perang Dingin. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan bantuan ekonomi Tiongkok kepada negara-negara Pasifik Selatan yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. Tiongkok tercatat sebagai pendonor terbesar ketiga selain Amerika Serikat dan Australia yang memberikan paket bantuan yang bertujuan memperkuat kerja sama perdagangan, meningkatkan kemampuan pemerintah dan militer dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya alam (Shie, 2007, pp. 307-326). Dengan tawaran bantuan ekonomi berupa pinjaman lunak dan jangka panjang menjadikan Tiongkok sebagai “Banker baru” di kawasan Pasifik Selatan (Hanson, 2011, pp. 1-23).

Pada mulanya kehadiran Tiongkok mendapat persetujuan dari Australia sebagai bentuk upaya penyeimbang kehadiran Uni Soviet di regional Pasifik Selatan. Salah satu bentuk sikap keterbukaan Australia terhadap Tiongkok ditunjukkan di masa Perdana Menteri Gough Whitlam yang disebut “*The father of Australia-China Relations*” dalam menjalin hubungan diplomatik dengan rezim komunis Tiongkok (McDonnell, 2014). Menurut Yang, pertumbuhan pengaruh Tiongkok di kawasan berjalan beriringan dengan hubungan baik yang terus ditingkatkan oleh Tiongkok kepada kekuatan tradisional di Pasifik Selatan yaitu

Australia sehingga hal-hal seperti perebutan pengaruh seharusnya tidak akan terjadi (Yang, 2011).

Namun dalam perkembangannya saat ini pengaruh Tiongkok semakin menguat sehingga dianggap dapat menyaingi hegemoni Australia di kawasan Pasifik Selatan. Tiongkok mendapat sambutan yang baik karena kemurahan hatinya dalam memberikan bantuan lunak kepada negara-negara seperti Fiji, Kepulauan Solomon, Samoa, Vanuatu dan lainnya. Hal ini ditandai dengan Tiongkok yang menjadi destinasi kunjungan pertama pemimpin-pemimpin Negara Pasifik Selatan, menunjukkan pemimpin negara kecil ini menaruh lebih banyak harapan kepada Tiongkok dibanding Amerika Serikat (AS) dan sekutunya termasuk Australia (Reilly, 2003, pp. 94-104). Terdapat hal yang menjadi pertimbangan negara-negara tersebut mendekati diri ke Tiongkok, seperti paska kejadian kudeta pada tahun 2006 di Fiji yang membuat Fiji melihat Tiongkok sebagai sosok yang lebih baik dibanding Australia¹.

Dalam hal mitra kerja sama perdagangan, Tiongkok menjadi pembeli dari berbagai hasil mineral yang terdapat di Fiji, sedangkan di tahun 2017 impor Fiji dari Tiongkok mencapai hingga 385 juta USD, hampir mendekati Australia diangka 402 juta USD (OEC Fiji, 2017). Tiongkok juga diterima sebagai peninjau dalam *Pacific Island Forum* (PIF) dan pengamat dalam *Melanesia Spearhead Group* (MSG), dua forum internasional yang anggota-anggotanya adalah negara di Pasifik Selatan.

Beberapa masalah kemudian muncul di antaranya ketika Fiji yang tergabung dalam PIF dituntut oleh Australia agar dapat menerapkan sistem pemerintahan

¹Tidak seperti Australia yang menuntut demokrasi berjalan di Fiji, Tiongkok memberikan bantuan tanpa mencampuri urusan dalam negeri Fiji.

yang demokratis seperti yang diterapkan oleh negara-negara kepulauan Pasifik Selatan lainnya, mengingat hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam keanggotaan PIF (Brown, 2012, p. 66). Hal ini terkait dengan berbagai kudeta yang terjadi dalam domestik Fiji, salah satunya ketika kudeta pada tahun 2006 di Fiji yang mengubah sistem pemerintahan Fiji dikuasai rezim militer. Australia yang memiliki pengaruh paling terbesar di kawasan dan juga di PIF mendesak diadakannya pemilu demokratis, atau Fiji akan dibekukan keanggotaannya dari PIF. Hal tersebut dapat menyebabkan Fiji tidak bisa lagi menerima bantuan luar negeri dari pendonor utamanya (Gaglioti, 2009). Namun kondisi perpolitikan domestik yang kurang stabil membuat pemilu sulit untuk dijalankan, seperti faktor kesenjangan antara etnis pribumi dan pendatang india sehingga kudeta dianggap menjadi salah satu jalan untuk mengatasi masalah kesenjangan etnis tersebut (Thomas, pp. 131-146).

Australia sebagai kekuatan hegemoni terbesar di wilayah Pasifik Selatan tidak hanya sekali mencampuri kegiatan domestik di Fiji, Australia sebelumnya juga pernah mengirimkan ribuan tentara di negara-negara Pasifik Selatan termasuk Fiji untuk mengatasi kudeta domestik Fiji yang dianggap dapat membahayakan Australia (Firth, 2005, p. 170). Kebijakan luar negeri lain yang diambil Australia menyangkut Fiji antara lain pernah mengakhiri sebagian besar proyek bantuan seperti beasiswa, pelatihan skill, dan pengurangan bantuan sebesar 30% ke Fiji. Dalam tingkatan regional Australia mengajak negara-negara lain di Pasifik Selatan untuk mengutuk kudeta Fiji dan memberikan tekanan yang besar agar tujuan Australia yaitu pemerintahan demokrasi yang konstitusional di Fiji berhasil tercapai (Firth, 2005, p. 211).

Australia juga menunjukkan kekuatan yang dimilikinya ketika membantu Kepulauan Solomon dalam mengatasi konflik etnis yang terjadi di negara tersebut. Meski awalnya menolak, namun akibat konflik yang tidak berkesudahan menyebabkan Australia akhirnya membentuk RAMSI (*Regional Assistance Mission to Solomon Island*) dan mengintervensi konflik di Kepulauan Solomon. Selain itu, Australia juga seringkali mengurangi bahkan menghentikan bantuan-bantuan ekonomi jika negara-negara di Pasifik Selatan tidak menjalankan demokrasi dengan baik dalam pemerintahan, seperti halnya terjadi di Fiji. Hal ini menunjukkan bagaimana Australia adalah hegemoni yang dapat mencampuri berbagai urusan dalam negeri negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Kondisi ini juga akhirnya oleh beberapa seperti Kepulauan Solomon, Fiji dan negara-negara lain di kawasan menganggap bahwa Tiongkok lebih mudah dalam memberikan bantuan ekonomi dan pinjaman lunak dibanding Australia yang seringkali mencampuri perpolitikan internal negara lain.

Berdasarkan pada uraian di atas, riset ini akan menganalisis bagaimana Australia menganggap kehadiran dan pengaruh Tiongkok di negara-negara kawasan di Pasifik Selatan menjadi ancaman terhadap dominasi dan hegemoni yang selama ini telah dibangun Australia. Mengingat kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan awalnya sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh Uni Soviet di kawasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kehadiran Tiongkok dapat mengancam pengaruh Australia di Negara-negara di Pasifik Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perspektif Australia yang menganggap Tiongkok sebagai ancaman di Pasifik Selatan.
2. Untuk mengetahui proses kedatangan Tiongkok ke beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan dan hubungan kerja sama yang terjalin didalamnya.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor terkait Tiongkok yang mengurangi kekuatan hegemoni Australia di kawasan Pasifik Selatan.
4. Untuk mengetahui sikap Australia atas kehadiran Tiongkok yang mengancam dominasi pengaruh Australia di kawasan.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, riset ini mencoba menganalisis kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan dapat mengancam Australia sebagai kekuatan hegemoni terbesar yang telah ada. Riset ini menggunakan *aggregate power*, *proximity*, *offensive capability* dan *offensive intentions* yang menjadi indikator dalam menganalisis rumusan masalah. Banyak peneliti yang telah meneliti tentang apa saja penyebab kehadiran Tiongkok di negara-negara kawasan Pasifik Selatan seperti Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan lainnya sekaligus melihat bagaimana respon negara-negara tersebut dalam menanggapi. Namun, riset ini akan melihat bagaimana ke-empat indikator tadi dapat mengukur tingkat ancaman yang diberikan Tiongkok atas kehadirannya di kawasan Pasifik Selatan terhadap

Australia. Riset ini layak untuk diteliti dalam mempelajari fenomena terkait studi keamanan dalam hubungan internasional.

1.5 Cakupan Penelitian

Cakupan dalam penelitian ini adalah kajian politik luar negeri Australia, khususnya rivalitas pengaruh Australia dan Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan dari sudut pandang Australia. Kawasan Pasifik Selatan sendiri dihuni oleh negara Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Kepulauan Cook, Nauru, Palau, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Riset dilakukan pada negara Fiji, Kepulauan Cook, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Vanuatu di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki hubungan kerja sama baik dengan Tiongkok dan Australia. Sedangkan belum ditemukan data terkait pada negara Kiribati, Nauru, Palau dan Tuvalu sehingga berdasarkan acuan kondisi geografis, stabilitas negara, gap ekonomi dan pembangunan infrastruktur antarnegara yang tidak jauh berbeda di kawasan Pasifik Selatan, ketujuh negara pada riset dapat menggambarkan kondisi kawasan secara keseluruhan.

Rivalitas ini dimulai ketika awal kedatangan Tiongkok pada beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan dari tahun 1980, hingga perkembangan kerja sama dan kebijakan luar negeri Tiongkok dan Australia terhadap negara-negara tersebut hingga tahun 2018 mengingat terdapat beberapa studi kasus yang penting untuk dimasukkan di dalam penelitian.

1.6 Tinjauan Pustaka

Beberapa artikel jurnal dan buku yang membahas terkait hubungan kerja sama yang terjalin antara Tiongkok-Fiji dan Australia-Fiji. Salah satunya adalah tulisan Tamara Renee Shie yang membahas terkait kebangkitan pengaruh

Tiongkok dengan berbagai tawaran bantuan melalui kerja sama perdagangan, infrastruktur, pengembangan SDA kepada Fiji (Shie, 2007, p. 309). Tiongkok melihat adanya celah yang ditimbulkan dari pengurangan bantuan/subsidi kepada Fiji oleh donor tradisional yaitu Australia dan Amerika Serikat di Kepulauan Pasifik, lalu mengambil kesempatan tersebut untuk lebih dekat dengan Fiji. Fokus penulis dalam tulisan ini yaitu upaya-upaya Tiongkok dalam meningkatkan pengaruh di Fiji.

Terkait kehadiran Tiongkok di hampir keseluruhan negara-negara yang terdapat di Pasifik Selatan, Denghua Zhang dalam penelitiannya menjelaskan terkait fenomena tersebut. Zhang berupaya menganalisis kepentingan Tiongkok di wilayah Pasifik, dan menemukan tiga pola untuk melakukan pendekatan kepada negara-negara tersebut di antaranya berupa kunjungan diplomasi, penguatan pengaruh melalui bantuan ekonomi dan kebijakan non-intervensi (Zhang, 2015, pp. 52-53). Penelitian ini berpendapat bahwa dengan pertumbuhan kekuatan ekonomi dan sektor strategis lain Tiongkok berjalan lurus dengan upaya Tiongkok dalam menjangkau global. Penjangkauan ini pasti lambat laun akan mencapai wilayah Pasifik dan mungkin mendapatkan peran yang lebih penting dalam memperluas strategi militer Tiongkok meski tidak dalam jangka waktu yang dekat.

Sehubungan dengan tulisan Zhang, Shahar Hameiri dalam risetnya mengklaim ada dua hal yang dapat dilihat dalam hubungan yang terjadi di antara Tiongkok-Pasifik Selatan-Australia ini. Pertama, terjadinya peningkatan bantuan ekonomi, perdagangan dan investasi ke wilayah kepulauan Pasifik tidak pada titik untuk dominasi regional namun lebih kecil kepada untuk mengamankan pasokan

sumber daya alam. Berdasarkan klaim pertama, klaim kedua Hameiri adalah kebangkitan Tiongkok juga tidak terlalu memiliki hubungan dengan program-program bantuan yang ditawarkan. Namun, pandangan yang terbangun saat ini di kawasan Pasifik Selatan lebih kepada upaya yang dibangun oleh para pemimpin-pemimpin di Pasifik untuk meningkatkan posisi tawar menawar dengan Australia dan membuat Australia bersikap lebih lunak (Hameiri, 2015, pp. 18-19).

Tulisan lain adalah milik Henderson & Reilly, yang menjelaskan kondisi ketika pemimpin negara-negara di Kepulauan Pasifik melakukan kunjungan ke Tiongkok dan mendapat sambutan hangat. Henderson & Reilly menjelaskan bagaimana kunjungan tersebut adalah bukti keberhasilan *Aid Diplomacy* Tiongkok untuk negara seperti Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan beberapa negara lainnya. Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak yang diberikan pada saat yang tepat oleh Tiongkok guna membangun hubungan baik ditengah stagnannya hubungan Australia dan negara-negara di kawasan Pasifik tersebut (Reilly, 2003, p. 102).

Peter Brown menekankan fokus Australia dalam *Pacific Island Forum* atau PIF menjadi 4 hal yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang baik, keamanan dan pembangunan berkelanjutan. Keempat hal ini diterapkan demi tercapainya stabilitas dan negara-negara di Kepulauan Pasifik menjadi dewasa dan demokratis (Brown, 2012, p. 69). Brown menjelaskan kekuatan pengaruh Australia yang dapat mengintervensi Fiji untuk mengadakan pemilu paska kudeta tahun 2006, namun kemudian menimbulkan penolakan Fiji dan akhirnya sanksi dijatuhkan terhadap Fiji, serta konflik hubungan seperti ini yang dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk melebarkan pengaruhnya.

Peter J. Connolly dalam risetnya menyatakan bahwa teori *'peaceful rise'* sudah tidak lagi sesuai dalam menggambarkan situasi dan dampak yang dapat diberikan oleh Tiongkok secara global. Hal ini berdasarkan pada kekuatan ekonomi, kapabilitas militer dan pengaruh regionalnya telah lama melewati batas untuk tetap menjadi negara dengan profil rendah. Perubahan perilaku Tiongkok ini didasarkan pada beberapa hal seperti sebagai upaya perlindungan warga negara Tiongkok di luar negeri dan kepentingan ekonomi sehingga gesekan dengan aktor-aktor lain dapat terjadi. Connolly juga mencontohkan hal tersebut melalui Papua New Guinea yang memiliki potensi yang menarik bagi Australia dan Tiongkok, sehingga terjadi persaingan pengaruh antara kedua negara di PNG (Connolly, 2016, p. 17). Hal yang sama juga berlaku bagi Australia dan Tiongkok dalam melihat negara-negara di Pasifik Selatan.

Sementara itu Stewart Firth, menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan luar negeri Australia yang diambil selama ini sejalan dengan kepentingan untuk melindungi negara dan menjaga stabilitas kawasan. Keputusan-keputusan seperti dalam pengiriman militer ketika terjadi kudeta dan pemberian sanksi pemotongan bantuan adalah tidak lebih dari upaya Australia mengawasi perkembangan politik dan menjalankan demokrasi agar tercipta kestabilan (Firth, 2005, p. 208). Firth berfokus pada kebijakan luar negeri Australia dan menekankan besarnya pengaruh Australia kepada Fiji dengan maksud untuk menunjukkan Australia peduli dalam menjaga kestabilan kawasan regional yang selama ini telah dijaga.

Vinsensio Dugis, mengemukakan argumen terkait dengan kehadiran Tiongkok dan hubungannya dengan pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan (Dugis, 2015, pp. 4-17). Dugis menyebutkan akan adanya faktor-faktor

yang dapat mendukung atau malah menghambat Tiongkok dalam menyebarkan pengaruhnya, apakah hal tersebut menjadi misi utama Tiongkok atau hanya sebuah perasaan takut tidak berdasar yang dirasakan oleh Australia terhadap perkembangan Tiongkok yang pesat.

Literatur-literatur di atas membahas tentang awal kedatangan Tiongkok di di kawasan Pasifik Selatan, dominasi pengaruh Australia sebagai pendonor tradisional di kawasan dan sikap pemerintah masing-masing negara kawasan Pasifik Selatan terhadap berbagai bantuan yang ditawarkan oleh kedua negara. Literatur-literatur di atas memperlihatkan adanya kepentingan dan konflik pengaruh antar aktor negara yang terlibat yaitu Australia-Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan, namun kurangnya pendalaman lebih lanjut untuk membahas kemungkinan adanya rivalitas yang dapat ditimbulkan akibat hegemoni Australia yang terancam dominasinya oleh Tiongkok membuat hal ini penulis rasa layak untuk dilakukan penelitian.

1.7 Landasan Konsep

Stephen M. Walt (1985, pp. 3-43), menjelaskan terkait bagaimana sebuah negara mengambil sikap ketika berhadapan dengan negara lain yang memiliki kekuatan yang setara atau lebih kuat. Di perlukan strategi yang sesuai dalam menyikapi ancaman untuk dapat menjaga keamanan negara, seperti halnya *balancing* dan *bandwagoning*.

Terhadap ancaman kekuatan yang melebihi dan menimbulkan ancaman terhadap suatu negara kecil yang lebih lemah, maka negara kecil itu dapat patuh dan ikut pada kekuatan ancaman tersebut (*bandwagoning*), sedangkan untuk negara yang memiliki kekuatan berimbang dengan ancaman maka dapat

mengupayakan penyeimbangan pengaruh dan kekuatan (*balancing*). Walt berpendapat bahwa sikap *balancing* itu tidak harus dengan meningkatkan kapabilitas militer (internal negara) sehingga berpotensi terjadi benturan perang fisik, namun negara dapat menjadi oposisi dari sumber ancaman dalam menyeimbangkan pengaruh dari sumber ancaman tersebut yang berusaha merusak hegemoni yang sudah ada.

Walt menyatakan alasan utama bagi negara untuk melakukan *balancing*, yaitu agar sumber ancaman/hegemon baru tidak menjadi semakin kuat karena penyebaran pengaruhnya dibiarkan saja. Pasalnya, jika negara tidak melakukan *balancing* maka negara tersebut beresiko gagal menahan laju dari hegemoni lain yang berpotensi mengancam keamanan negara kedepannya (Walt, 1985, p. 5).

Walt menjabarkan empat faktor yang menjadi pertimbangan suatu negara dalam mengukur tingkat ancaman (*the level of threat*), yaitu:

1. *Aggregate power*, semakin besar total sumber daya dari negara ancaman (populasi, kecakapan militer, dana pertahanan, dll) maka semakin besar potensi ancaman yang ditimbulkannya kepada negara lain.
2. *Proximity*, posisi dan kekuatan ancaman terdekat yang berhubungan dengan negara ancaman utama yang dapat menunjukkan pergerakan potensial apabila diperhatikan secara baik oleh negara yang terancam.
3. *Offensive capability/Offensive power*, negara dengan kemampuan militer yang besar/setara/mendekati dianggap paling berpotensi menjadi ancaman bagi hegemoni negara lainnya.

4. *Offensive intentions*, negara sumber ancaman yang terlihat bertindak agresif dalam penyebaran pengaruh, cenderung memprovokasi yang lain dengan berbagai kebijakan-kebijakan agresif sehingga seringkali menimbulkan gesekan kepentingan.

Walt mengemukakan bahwa hal-hal di atas yang kemudian menjadi patokan negara mengambil sikap dan kebijakan dalam menghadapi negara-negara lain yang dianggap menjadi ancaman dari hegemon yang ada dalam persaingan penyebaran pengaruh. Walt menggunakan studi kasus dua negara superpower era perang dingin yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Dengan berlandaskan pada hal di atas, pada makalah ini penulis akan mencoba mengaplikasikan dalam konteks hubungan yang terbangun diantara Australia dan Tiongkok sebagai negara dominan yang saling bersaing pengaruh di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Dengan mengaplikasikan empat faktor yaitu *aggregate power*, *proximity*, *offensive capability* dan *intentions* dalam menilai Tiongkok. Sehingga dapat mengukur tingkat ancaman yang diberikan oleh Tiongkok terhadap Australia di kawasan Pasifik Selatan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis analisis penelitian kualitatif dan deskriptif yaitu studi pustaka terhadap objek/subyek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan topik yang akan ditinjau yakni bagaimana Australia melihat kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik

Selatan semakin lama semakin mengancam pengaruh dominasi yang telah Australia bangun selama ini.

Rumusan masalah ini nantinya akan dianalisis dan dijelaskan dengan konsep yang digagas oleh Stephen M. Walt terkait *Alliance Formation and the Balance of World Power*, mengenai kehadiran Tiongkok dan hubungan kerja sama yang dijalin dengan beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan, dapat mengancam dominasi Australia di kawasan Pasifik Selatan. Penelitian kualitatif sendiri memiliki artian penelitian ilmiah yang melihat dan memahami suatu fenomena konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Haris, 2010, p. 9).

Dalam interaksi yang dijelaskan, menemukan jawaban dari hasil penelitian juga dapat menggunakan literatur yang menyangkut penelitian tersebut. Pengambilan data ini bisa berupa dokumen, jurnal ilmiah, buku terkait teori dan pandangan, serta website resmi mengenai penjelasan kebijakan yang berlaku di tiap-tiap negara yang menjalankan atau terlibat dalam fenomena tersebut.

1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah negara Tiongkok dan Australia sedangkan sikap dan hubungan kerja sama yang dibangun terhadap negara di kawasan Pasifik Selatan sebagai objek. Untuk membantu menganalisis fenomena dalam menjawab rumusan masalah, penulis menerapkan metode dari Stephen M. Walt dalam menjelaskan

terkait Australia yang merasa terancam hegemoninya di kawasan akibat tindakan-tindakan dan pengaruh Tiongkok.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dengan mengambil dokumen atau literatur resmi yang terpercaya dan mengkritisnya dengan perubahan-perubahan yang ada. Sebagian besar buku-buku yang diambil adalah buku-buku rujukan terhadap Proses penelitian terkait kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Australia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, serta pengaruh yang muncul didalam kedua kerja sama tersebut yang bisa saling mempengaruhi antar subjek satu sama lain.

1.8.3 Proses Penelitian

Proses penelitian menyangkut perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian yang mana hal tersebut dijadikan sebagai panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa tahap yang akan dilakukan adalah:

1. Pra Riset mencakup kegiatan untuk persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian.
2. Mengumpulkan dan mengolah data-data yang bersumber dari tulisan-tulisan akademik seperti jurnal, buku-buku pendukung, laman resmi, dan juga berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya didasarkan pada reputasi kredibilitas media/penerbit dan hubungannya dengan topik penelitian.

3. Melakukan analisis dari data yang sudah diperoleh dan hasil pemikiran dari temuan dan deskripsi yang terkait untuk menjawab rumusan masalah dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

